



**PEMERINTAH KOTA TERNATE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

NO SOP : 000.7 / 55 / 2025  
TGL PEMBUATAN : 19/01/2024  
TGL REVISI : -  
TGL PENGESAHAN : 19/01/2024  
DISAHKAN OLEH :



NAMA SOP : **Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate;
5. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Sarjana (S1)
2. Memahami peraturan perundangan yang terkait
3. Memahami sasaran dan capaian program
4. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menganalisa persoalan
5. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu
6. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi serta berkolaborasi dengan baik dalam tim

**KETERKAITAN**

- 1 SOP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2 SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

**PERALATAN/KELENGKAPAN**

- 1 Komputer PC/Laptop
- 2 Alat Tulis Kantor
- 3 Jaringan Internet
- 4 Program Kerja
- 5 Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- 6 Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program

**PERINGATAN .**

- 1 Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RKPD, anggota DPRD dan wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 3 (tiga) bulan.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

- 1 Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD

No	Kegiatan	PELAKSANA																MUTU BAKU					
		Perencana	Kabid	Sekretaris	Tim Penyusun	Kepala	Perangkat Daerah	TAPD	Pemangku Kepentingan	Sekretaris Daerah	Bagian Hukum	Walikota	Kepala BAPPEDA Provinsi	Gubernur	Masyarakat	DPRD	Tenaga Ahli	Inspektorat	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
A.	<b>PERSIAPAN PENYUSUNAN RKPD</b>																						
1	Penyusunan draft SK Tim Penyusun RKPD																			Permendagri 86 Tahun 2017	120 menit	draft SK Tim Penyusun RKPD	
2	Penetapan SK Tim Penyusun RKPD																			Draft SK Tim Penyusun RKPD	60 menit	SK Tim Penyusun RKPD	
3	Orientasi Tim Penyusun RKPD																			Permendagri 86 Tahun 2017	600 menit	Notulen koordinasi	
4	Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD																			Permendagri 86 Tahun 2017	300 menit	Agenda kerja Tim penyusun RKPD	
5	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																			Data historis Perangkat Daerah, data statistik BPS, Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah	5 hari	Data dan informasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	
B.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD</b>																			dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana			
6	Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2023																			Data dan informasi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	1,5 bulan	Draft Ranwal RKPD Tahun 2023	
7	FGD Permasalahan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan																			Draft Ranwal RKPD Tahun 2023	300 menit	Usulan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD	
8	Verifikasi Usulan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD																			Usulan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD	5 hari	Usulan Masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi	
9	Penyampaian Ranwal RKPD kepada Walikota melalui Sekda untuk persetujuan konsultasi publik																			Ranwal RKPD	120 menit	Persetujuan Konsultasi Publik	
10	Konsultasi Publik																			Ranwal RKPD	300 menit	BA Konsultasi Publik	
11	Penyempurnaan Ranwal RKPD Tahun 2023 dengan BA Konsultasi Publik																			BA Konsultasi Publik	3 hari	Ranwal RKPD yang disempurnakan sesuai BA Konsultasi Publik	
12	Pengajuan Ranwal RKPD Tahun 2023 kepada Walikota untuk memperoleh persetujuan dalam bentuk Surat Edaran																			Ranwal RKPD yang disempurnakan sesuai BA Konsultasi Publik	120 menit	SE Walikota	
13	Penyampaian Surat Edaran Walikota Kepada Perangkat Daerah																			SE Walikota	1 hari	SE Walikota	paling lambat pada minggu kedua bulan Februari
C.	<b>PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH</b>																						
14	Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan SE																				3 hari	Rancangan Renja PD	
15	FGD Perumusan Program dan Kegiatan																			Rancangan Renja PD	300 menit	Berita Acara	
16	Verifikasi Usulan Masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD																			Usulan masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2 minggu	Usulan masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah diverifikasi	
17	Forum Perangkat Daerah																			Rancangan Awal Renja PD	1 hari	BA Forum PD	
18	Penyempurnaan Rancangan Renja PD Tahun 2023 berdasarkan BA Forum PD																			BA Forum PD	3 hari	Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan	

No	Kegiatan	PELAKSANA																MUTU BAKU				
		Perencana	Kabid	Sekretaris	Tim Penyusun	Kepala	Perangkat Daerah	TAPD	Pemangku Kepentingan	Sekretaris Daerah	Bagian Hukum	Walikota	Kepala BAPPEDA Provinsi	Gubernur	Masyarakat	DPRD	Tenaga Ahli	Inspektorat	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
19	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan RKPD																		Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan	120 menit	Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan	
20	Forum Sinkronisasi dan Verifikasi Rancangan Renja PD																		Rancangan Awal Renja PD yang disempurnakan	1 hari	Rancangan Awal Renja PD yang telah disinkronisasi dan diverifikasi	
<b>D. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD</b>																						
21	Penyusunan Rancangan RKPD																		Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan	2 minggu	Rancangan RKPD	diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April
22	Penyampaian rancangan RKPD Tahun 2023 kepada Walikota melalui Sekda guna mendapat persetujuan untuk dibahas																		Rancangan RKPD	180 menit	Rancangan RKPD	
<b>E. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD</b>																						
23	Persiapan pelaksanaan musrenbang																		Rancangan RPJPD, bahan paparan, susunan acara, panitia pelaksana, undangan, fasilitator, narsium	1 hari	Bahan musrenbang	
24	Pelaksanaan musrenbang																		Bahan musrenbang	240 menit	Masukan dari peserta	
25	Perumusan berita acara kesepakatan hasil musrenbang																		Masukan dari peserta	60 menit	Berita acara hasil kesepakatan	
<b>F. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD</b>																						
26	Perumusan Rankhir RKPD berdasarkan BA Kesepakatan Musrenbang Kota																		Berita acara hasil kesepakatan	1 minggu	Rancangan Akhir RKPD	
27	Pembahasan Rankhir RKPD bersama Kepala OPD dan TAPD																		Rancangan Akhir RKPD	1 minggu	Berita Acara Pembahasan	
28	Penyempurnaan Rankhir RKPD berdasarkan Hasil Pembahasan Kepala OPD dan TAPD																		Berita Acara Pembahasan	1 minggu	Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan	
29	Verifikasi Rankhir RKPD/Renja Perangkat Daerah																		Rancangan Akhir Renja/RKPD	1 minggu	Rancangan Akhir Renja/RKPD yang telah diverifikasi	
30	Penyempurnaan Rankhir RKPD / Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi																		Rancangan Akhir Renja/RKPD yang telah diverifikasi	3 hari	Rancangan Akhir RKPD	
31	Reviu Tenaga Ahli																		Rancangan Akhir RKPD	2 minggu	BA Reviu Tenaga Ahli	
32	Reviu Inspektorat																		Rancangan Akhir RKPD	2 minggu	BA Reviu Inspektorat	
33	Pengendalian Perumusan Kebijakan Rankhir RKPD																			2 minggu		
34	Penyempurnaan Rankhir RKPD berdasarkan hasil Reviu APIP, Tenaga Ahli dan hasil Pengendalian Kebijakan																		Rancangan Akhir RKPD	4 hari	Rancangan Akhir RKPD yang disempurnakan	
35	Penyampaian Rancangan Akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan dan dievaluasi oleh Gubernur																		Rancangan Akhir RKPD yang disempurnakan	300 menit	Rancangan Akhir RKPD yang disempurnakan	
36	Penyampaian Rancangan Perwali RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk dievaluasi																		Rancangan Perwali RKPD	2 hari	Rancangan Perwali RKPD	evaluasi dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara

No	Kegiatan	PELAKSANA																MUTU BAKU				
		Perencana	Kabid	Sekretaris	Tim Penyusun	Kepala	Perangkat Daerah	TAPD	Pemangku Kepentingan	Sekretaris Daerah	Bagian Hukum	Walikota	Kepala BAPPEDA Provinsi	Gubernur	Masyarakat	DPRD	Tenaga Ahli	Inspektoral	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
37	Evaluasi Gubernur atas Rancangan Akhir RKPD																		Rancangan Perwali RKPD	2 minggu	Rancangan Perwali RKPD yang telah dievaluasi Gubernur	
38	Penyempurnaan Rancangan Perwali RKPD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur																		Rancangan Perwali RKPD	1 minggu	Rancangan Perwali RKPD yang disempurnakan	
39	Penyampaian Rancangan Perwali RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dan diundangkan																		Rancangan Perwali RKPD yang disempurnakan	600 menit	Perwali RKPD	